

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2024-2026**

1 Perangkat Daerah	:	Sekretariat Darah Provinsi Kalimantan Timur
2 Tugas	:	Membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif
3 Fungsi	:	a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
4 Indikator Kinerja Utama	:	

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, dan hukum untuk mendorong sumber daya manusia yang berdaya saing	1	Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persen	Jumlah kebijakan bidang Pemerintahan dan Otda yg disahkan / Jumlah kebijakan bidang pemerintahan dan otda yg dirumuskan x 100%	Laporan pada Bagian Pemerintahan dan Bagian Otonomi Daerah	Biro POD	
		2	Persentase LPPD yang di laporkan	Persen	Jumlah Indikator Kinerja Kunci Outcome yang terlapor / Jumlah Indikator Kinerja Kunci Outcome dari Perangkat Daerah x 100%	Pengampu indikator kinerja kunci SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan data BPS		
		3	Persentase Kerja sama daerah yang difasilitasi	Persen	Jumlah usulan kerja sama yang difasilitasi / Jumlah usulan kerja sama x 100%	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		
		2	1	Persentase perumusan kebijakan di bidang kesra yang di fasilitasi	Persen	Kebijakan Bidang Kesra Yang ditindaklanjuti /Semua kebijakan bidang Kesra dari pemerintah pusat yang harus ditindaklanjuti, serta isu permasalahan daerah yang membutuhkan kebijakan daerah x 100%	Laporan Seluruh Bagian di Biro Kesra	Biro Kesra
				2	Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana Prasarana Kegamaan yang di fasilitasi	Persen	Lembaga bina spiritual dan sarana prasarana yang difasilitasi/jumlah lembaga spiritual dan jumlah sarana dan prasarana terdata di Kalimantan Timur x 100%	
		1	1	Dokumentasi rancangan produk hukum pengaturan/ranperda yang diharmonisasi	Dokumen	Jumlah produk hukum yang masuk / Jumlah produk hukum yang diselesaikan X 100%	Usulan dari Perangkat Daerah terkait Produk Hukum Penetapan dan Pengaturan	Biro Hukum
				2	Persentase perkara/kasus sengketa Pemerintah Provinsi yang terselesaikan tepat waktu	Persen	Jumlah Perkara yang diselesaikan / Jumlah perkara yang masuk X 100 %	
3	Dokumen rancangan produk hukum daerah kabupaten/kota di fasilitasi dan evaluasi			Persen	Jumlah produk hukum yang difasilitasi, evaluasi dan klarifikasi/pengkajian / Jumlah produk hukum kab/kota X 100%	Rancangan Peraturan Produk Hukum Kab/Kota		
2	Meningkatnya kualitas kebijakan bidang ekonomi, administrasi pembangunan, dan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang mendorong ekonomi yang berkualitas	1	Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang fasilitasi	Persen	Jumlah Realisasi Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian / Jumlah Target Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian x 100%	Laporan Hasil Realisasi Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian	Biro Perekonomian	
		2	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari hasil kebijakan Bidang Perekonomian	Persen	Jumlah Nominal yang disetorkan menjadi PAD / Jumlah Nominal Target x 100%	Laporan setoran dari masing-masing BUMD		
		1	Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Level	Hasil penilaian dari LKPP	LKPP	Biro PBJ	
		2	Persentase Transaksi e-Purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia	Persen	Jumlah nilai pengadaan melalui penyedia / jumlah nilai transaksi melalui e-purchasing x 100%	LPSE Kaltim dan Aplikasi SIPESUT		
		1	Persentase rekomendasi pelaksanaan pembangunan daerah oleh Perangkat Daerah	Persen	Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah/ Target Rekomendasi x 100%	Tepra Kaltim		Biro Adbang
3	Meningkatnya kualitas layanan dan kebijakan untuk penerapan administrasi dan birokrasi yang BerAHKLAK	1	Indeks Kelembagaan	Indeks	Perhitungan dengan Menggunakan PermenPAN.RB No.20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Komponen yang dinilai adalah Dimensi Struktur Organisasi dan Dimensi Proses Organisasi.  Penjelasan : Pedoman evaluasi kelembagaan instansi pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya	Laporan Hasil Evaluasi Kelembagaan	Biro Organisasi	
		2	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	Perhitungan dengan Menggunakan Peraturan menteri dalam negeri nomor 99 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah.  Penjelasan : Mengukur Tingkat Kematangan Organisasi adalah merupakan hasil dari penilaian terhadap Efektifitas dari Pembentukan suatu Perangkat Daerah yang diukur dari tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi	Laporan Hasil Penilaian Kematangan Organisasi		
		3	Jumlah Perangkat Daerah kluster Utama yang mendapat Nilai AKIP perdikat minimal A (Memuaskan)	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah Kluster Utama yang mendapat Nilai AKIP perdikat minimal A (Memuaskan) - Angka Absolut Perangkat Daerah yang masuk dalam kluster utama adalah Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebanyak 14 Perangkat Daerah  Penjelasan: Mengukur tingkat Akuntabilitas Kinerja terhadap 14 Perangkat Daerah yang menjadi Kluster Utama apakah sudah memperoleh Predikat A / Memuaskan sesuai dengan Evaluasi SAKIP sesuai dengan PermenPAN.RB No.88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat		

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2024-2026**

1 Perangkat Daerah : Sekretariat Darah Provinsi Kalimantan Timur

		4	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Peringkat Minimal BB (Sangat Baik)	Persen	(Jumlah Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Peringkat Minimal BB) / (Jumlah Seluruh Perangkat Daerah yang dinilai SAKIPnya) x 100%  Penjelasan: Mengukur tingkat Akuntabilitas Kinerja terhadap Perangkat Daerah sesuai dengan Evaluasi SAKIP sesuai dengan PermenPAN.RB No.88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat	
		5	Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	Persen	(Jumlah Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80) / (Jumlah Seluruh Perangkat Daerah yang menyampaikan SKM) x 100%  Penjelasan: untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.	Laporan Rekapitulasi Penyampaian Data SKM Perangkat Daerah	
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik Perangkat Daerah	1	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	Jumlah Perhitungan Komponen Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan  Penjelasan : Komponen perhitungan meliputi 1. Presentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu (40%) 2. Presentase realisasi anggaran (30%) 3. Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (25%) 4. Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (5%)	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Biro Adpim dan Umum
		2	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	Persen	Jumlah Keluhan pengguna layanan / Jumlah Keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti x 100 %	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	
		3	Indeks Kepuasan Pimpinan terhadap pelayanan Keprotokolan dan Materi Komunikasi Pimpinan	Indeks	Perhitungan Indeks sesuai dengan komponen survei yang diselenggarakan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Keprotokolan dan Materi Komunikasi Pimpinan	Biro Adpim